
SISTEM PENAGIHAN BADAN USAHA MELALUI EDABU DI BPJS KESEHATAN CABANG PALEMBANG

¹Rani Wisudawati, ²Qoriani Widayati

¹Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, raniwisuda98@gmail.com

²Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, qoriani_widayati@binadarma.ac.id

Abstract - In accordance with Law No.24 of 2011 Article 15 paragraph (2), every company / business entity is required to register its workers as members of the Health BPJS. Therefore, every Business Entity must bear and pay a number of monthly contributions to all its employees. The business entity sees the monthly bill details through edabu. With billing system through edabu, business entities see monthly bills through edabu, but edabu billing systems are less efficient because pay differences often occur because the amount billed and the amount paid by the business entity is not appropriate, because the business entity issues employees but does not report to BPJS Health. So that employees who are not active in the company are still active in BPJS Health and bills on a monthly basis are still billed, even though employees in the company are not working at the company. BPJS Health should provide information to business entities to immediately report if there is an employee recruitment. The problem in this research is how the BPJS billing system goes to the business entity and how the business procedures check bills through e-dabu. This study aims to find out the BPJS Health Billing System to the Business Entity and to find out the procedures of the Business Entity to check bills through e-dabu. The method used in this study is descriptive analysis. The results of this study indicate that the Business Entity billing system through Edabu in the Palembang BPJS Health Branch is generally good and appropriate. But when comparing it to accounting standards, it is entirely not efficient enough.

Keywords: System, Billing, Edabu

Abstrak - Sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat(2), Setiap perusahaan/Badan Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Maka dari itu setiap Badan Usaha harus menanggung dan membayarkan sejumlah iuran setiap bulannya untuk semua karyawannya. Badan usaha melihat rincian tagihan iuran setiap bulan melalui edabu. Dengan sistem penagihan melalui edabu, badan usaha melihat tagihan iuran setiap bulannya melalui edabu, namun sistem penagihan melalui edabu kurang efisien karena sering terjadi selisih bayar karena jumlah yang ditagihkan dan jumlah yang dibayarkan oleh badan usaha tidak sesuai, karena badan usaha mengeluarkan karyawan tetapi tidak melaporkan ke Pihak BPJS Kesehatan. Sehingga karyawan yang tidak aktif di perusahaan tersebut masih berstatus aktif di BPJS Kesehatan dan tagihan di setiap bulannya tetap ditagihkan, padahal karyawan di perusahaan tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Seharusnya pihak BPJS Kesehatan memberikan informasi kepada badan usaha untuk segera melaporkan jika ada perekrutan karyawan. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Sistem penagihan BPJS Ke Badan Usaha dan bagaimana prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui e-dabu. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Sistem Penagihan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha dan Untuk mengetahui prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui e-dabu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan sistem penagihan Badan Usaha melalui Edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang secara umum baik dan sesuai. Namun bila membandingkannya dengan standar akuntansi, sepenuhnya belum cukup efisien

Kata kunci: Sistem, Penagihan, Edabu

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2), Setiap perusahaan/Badan Usaha (Pemberi Kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Kesehatan ,tanpa terkecuali. Walaupun Badan Usaha tersebut telah memiliki kerjasama dengan asuransi kesehatan Swasta, tetap harus mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Kesehatan.. Maka dari itu setiap Badan Usaha harus menanggung dan membayarkan sejumlah iuran setiap bulannya untuk semua karyawannya. Pihak BPJS menagihkan ke Badan Usaha dengan cara mengirimkan email ke masing-masing Badan Usaha dan menagihkan melalui Edabu. Edabu adalah singkatan dari Elektronik Badan Usaha yaitu sistem yang dibuat untuk memudahkan semua Badan Usaha untuk melakukan pengecekan jumlah tagihan, penambahan jumlah peserta dengan menginput secara langsung, mutasi peserta, pengurangan dan bisa memilih faskes. Namun seringkali adanya kendala dalam nilai tagihan di Edabu yang tidak sesuai atau melebihi batas, hal ini di karenakan pembayaran dibulan sebelumnya ada kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil peninjauan langsung di BPJS Kesehatan Cabang Palembang, maka dapat dirumuskan masalah yang dihadapi ialah bagaimana Sistem penagihan BPJS Ke Badan Usaha dan bagaimana prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui e-dabu. Adapun tujuan penelitian ialah Untuk mengetahui Sistem Penagihan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha dan untuk mengetahui prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui e-dabu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan [1].

2.2 Penagihan

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih [2].

2.3 E-dabu

Edabu adalah singkatan dari Elektronik Badan Usaha yaitu sistem yang dibuat untuk memudahkan semua Badan Usaha untuk melakukan pengecekan jumlah tagihan, penambahan jumlah peserta dengan menginput secara langsung, mutasi peserta, pengurangan dan bisa memilih faskes [3].

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecah masalah [4]. Dengan metode ini data yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan, serta pengalaman peneliti yang pernah melakukan magang di BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Pada bagian hasil ini, peneliti akan membahas mengenai sistem penagihan BPJS Kesehatan ke badan usaha dan prosedur badan usaha mengecek tagihan melalui e-dabu.

1. Sistem Penagihan Badan Usaha di BPJS Kesehatan Cabang Palembang

a. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi laporan penagihan badan usaha di BPJS Kesehatan Cabang Palembang:

- 1) Admin e-dabu
Pegawai yang bertugas dibagian edabu ialah untuk mengecek iuran badan usaha yang sudah atau belum melakukan pembayaran pada setiap bulannya, dan jika ada keluhan pada badan usaha maka PIC (*Person In Charge*) badan usaha dapat melaporkan kepada admin e-dabu.
- 2) Bagian Kepesertaan
Bagian ini bertugas untuk menerima dokumen peserta yang terdaftar aktif di badan usaha, serta mengecek tagihan iurannya sesuai dengan kepesertaan badan usaha.
- 3) Bagian Keuangan
Bagian ini bertugas untuk melakukan menampilkan dokumen tagihan iuran yang dibayarkan oleh badan usaha ke Pihak BPJS Kesehatan.
- 4) Badan Usaha
Badan usaha ialah perusahaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan yang melihat rincian tagihan iuran di edabu setiap bulannya. Badan usaha membuka akun e-dabu untuk melihat tagihan serta melakukan pembayaran atas tagihan iuran bulanan. Badan usaha harus melakukan pembayaran sesuai tagihan yang tertera di e-dabu sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi laporan penagihan badan usaha di BPJS Kesehatan Cabang Palembang:

- 1) Bukti Tagihan Badan Usaha yang ada pada sistem di keuangan BPJS Kesehatan.
Dokumen ini digunakan sebagai bukti penagihan iuran setiap bulannya dan iuran yang dibayarkan badan usaha ke pihak BPJS Kesehatan Cabang Palembang.
- 2) Tagihan Iuran Badan Usaha.
Dokumen ini digunakan sebagai badan usaha untuk membayarkan tagihannya ke pihak BPJS Kesehatan Cabang Palembang.
- 3) Data Peserta
Dokumen ini digunakan untuk melihat jumlah peserta badan usaha yang aktif terdaftar di BPJS Kesehatan.

2. Prosedur Sistem Penagihan Badan Usaha di BPJS Kesehatan Cabang Palembang

Pelaksanaan sistem penagihan badan usaha di BPJS Kesehatan Cabang Palembang terdiri dari unsur pokok yang saling berhubunga yaitu sebagai berikut:

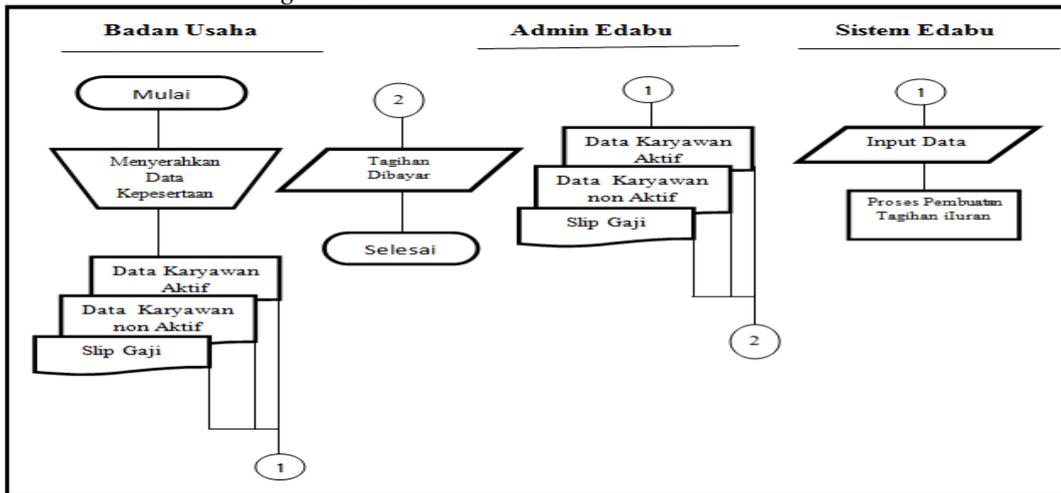
a. Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.

b. Alat

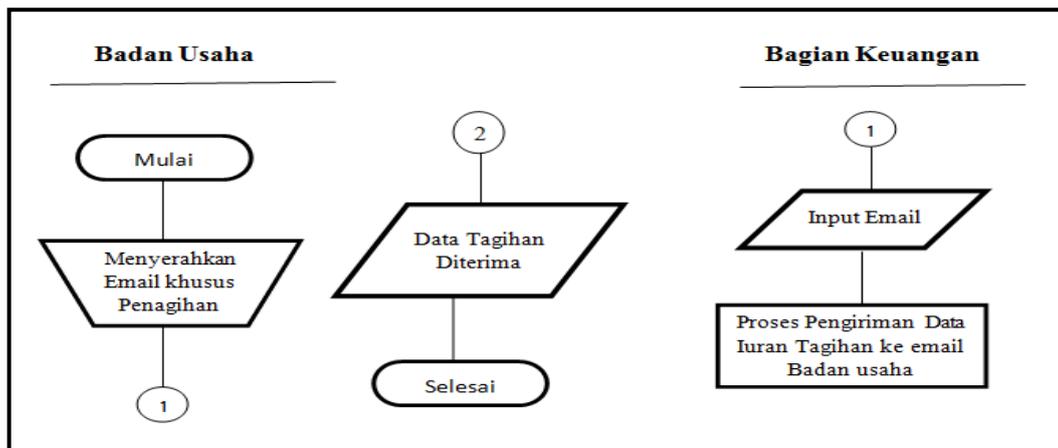
Alat yang digunakan di BPJS Kesehatan Palembang dalam sistem penagihan badan usaha ialah dengan menggunakan komputer, yang berkaitan dengan sistem penagihan badan usaha sehingga pekerja akan lebih efisien dan penagihan badan usaha lebih terjamin.

a. *Flowchart Sistem Penagihan Badan Usaha melalui edabu*



Gambar 1. *Flowchart Sistem Penagihan Badan Usaha melalui edabu*

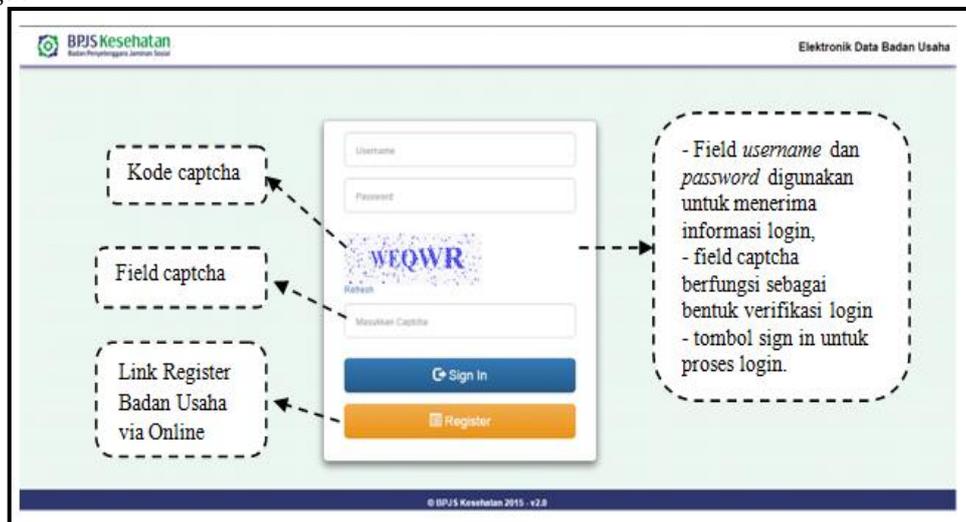
b. *Flowchart Sistem Penagihan melalui Email*



Gambar 2. *Flowchart Sistem Penagihan melalui Email*

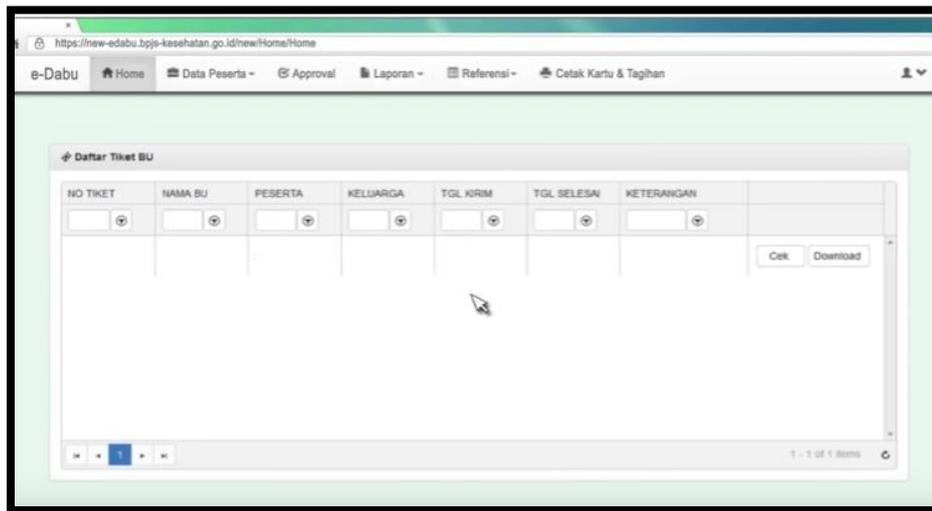
3. *Prosedur Badan Usaha mengecek Tagihan melalui Edabu*

a. *Login*



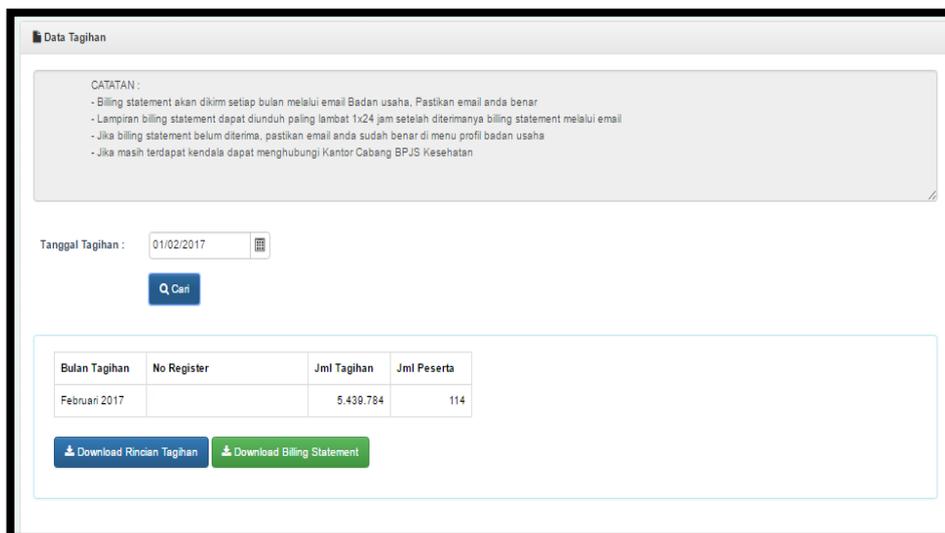
Gambar 3. *Form Login Edabu*

b. Home



Gambar 4. Home e-dabu

c. Tagihan



Gambar 5. Form Tagihan Iuran Badan Usaha

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai perbandingan antara data di objek penelitian dengan teori yang dibahas yang ada pada pembahasan yang dilakukan oleh penulis:

1. Sistem Pengendalian Intern di BPJS Kesehatan Cabang Palembang

Pengendalian Intern di BPJS Kesehatan yaitu [3]:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Manajemen BPJS Kesehatan menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi.
- b. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia, pembagian tugas, penyelesaian dan rotasi jabatan di BPJS Kesehatan sudah jelas dan tertulis dalam manual dan deskripsi pekerjaan.
- c. Penentuan resiko penunggakan yang akan berpengaruh terhadap piutang badan usaha, semakin sering badan usaha menunggak maka performance bagian keuangan semakin turun.
- d. Aktivitas Pengendalian (*Control Procedure*).
 - 1) Pengendalian Aliran Pekerjaan, berhubungan dengan piutang badan usaha.

-
- 2) Aktivitas Dokumentasi yang ada pada BPJS Kesehatan ialah bukti tagihan badan usaha, tagihan iuran, dan data peserta
 - 3) Rekonsiliasi, menyangkut piutang badan usaha pencocokan tagihan BPJS dengan saldo piutang badan usaha di bagian akuntansi keuangan.
- e. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Pihak BPJS Kesehatan tidak ada informasi mengenai badan usaha, riwayat tentang pembiayaan badan usaha tersebut apakah badan usaha tersebut pernah melakukan penunggakan ke Pihak BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

Sedangkan Pengendalian Internal dalam Sistem Penagihan yang terkomputerisasi adalah Pengendalian Organisasi yang mencakup:

- a. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian [5], yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pemisahan semistanya fungsi yang tidak sejalan seperti penyiapan transaksi masukan, pemrograman dan operasi komputer.
 - 2) Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi edabu. Pemrolean sistem aplikasi dan listing program dari pihak ketiga.
- b. Pengendalian terhadap data entri dan program, Hal ini sesuai dengan teori Romney yaitu sebagai berikut:
 - 1) Struktur otorisasi telah ditetapkan atas transaksi yang dimasukkan kedalam sistem.
 - 2) Akses ke data dan program hanya bagi karyawan yang memegang aplikasi edabu.
- c. Pemisahan Tugas dan Fungsi Sistem edabu pada BPJS Kesehatan Cabang Palembang, hal ini sesuai dengan teori Romney yaitu sebagai berikut:
 - 1) Administrasi sistem (*System Administration*)
 - 2) Manajemen jaringan (*Network Management*)
 - 3) Manajemen pengamanan (*Security Management*)
 - 4) Manajemen perubahan (*Change Management*)
 - 5) Pemakai (*user*)
 - 6) Analisis sistem (*System Analysis*)
 - 7) Pemrograman (*Programming*)
 - 8) Operasi Komputer (*Computer Operation*)
 - 9) Perpustakaan sistem edabu dan pengendalian data
- d. Pengendalian Akses Secara Fisik
Pengendalian yang dilakukan di BPJS Kesehatan atas akses secara fisik yaitu dengan meletakkan komputer dalam ruang terkunci, adanya batasan akses ke personil yang memiliki otorisasi, membuat jalan masuk yang terkunci aman dan diawasi dengan baik, meminta ID pegawai [1].
- e. Pengendalian Akses Secara Logis
Beberapa pengamanan data di BPJS Kesehatan yang dilakukan untuk membatasi akses logis, adalah sebagai berikut [1]:
 - 1) Menetapkan hak akses pegawai BPJS Kesehatan dan pihak luar
 - 2) Meninjau aktivitas yang dilakukan pemakai baik dalam membaca, menghapus, dan mengubah data.
 - 3) Mengenalkan kepada pemakai penggunaan password. Password merupakan serangkaian karakter yang hanya diketahui oleh pemakai dan sistem edabu.
 - 4) Penggunaan kartu identitas (ID Card) dan karakteristik personal pemakai dengan sidik jari, pemindai retina, wajah, tanda tangan, dan sistem sandi tekan.
 - 5) BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan menggunakan matriks pengendalian akses berupa daftar nomor identifikasi dan password para pemakai yang memiliki otorisasi, daftar seluruh file data, data program, dan akses setiap pemakai.

-
- f. Perlindungan Atas PC dan Jaringan Server
Pengendalian di BPJS Kesehatan yang dilakukan untuk menghindari resiko tersebut, Hal ini sesuai dengan teori Romney adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukakan inventori atas PC dan pemakainya
 - 2) Membatasi data yang disimpan atau yang didownload dan melarang pemakai mengkopi software untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Apabila pemisahan tugas secara fisik tidak mungkin untuk dilakukan maka gunakan pengendalian password berlapis yang membatasi akses pegawai kedata yang tidak sesuai
 - 4) Pihak BPJS Kesehatan menggunakan program pengamanan untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan.
- g. Pengendali Atas Internet
Pengendalian yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk mengamankan kegiatan internet dan mencegah kerusakan data perlengkapan serta menghindari akses yang tidak memiliki otorisasi atas data rahasia, adalah sebagai berikut [1]:
- 1) *Password*
 - 2) *Teknologi enkripsi*
 - 3) *Prosedur verifikasi routing*
 - 4) *Penggunaan firewall*
 - 5) *Penggunaan amplop elektronik*

2. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Penagihan Badan Usaha melalui Edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang

Dalam pelaksanaan laporan sistem penagihan badan usaha melalui edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang mempunyai keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Keunggulan

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Sistem Penagihan Badan Usaha melalui edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang sudah terolah secara elektronik atau terkomputerisasi. Dilihat dari sistem penagihannya dititikberatkan pada orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur, sitem penagihan, pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi. Maka dari itu aplikasi edabu di BPJS Kesehatan sudah terkomputerisasi, Semua data tagihan iuran, tagihan yang dibayar dan jumlah pesera badan usaha yang terdaftar sudah terkomputerisasi secara otomatis. Sistem penagihan dapat terjamin keamanannya dan data akuntansi yang di catat dapat dicek ketelitian dan kendalanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal dalam sebuah perusahaan maka semakin kecil kemungkinan pegawai dalam melakukan kecurangan akuntansi , bahwa semakin tinggi keefektifan sistem pengendalian internal akan semakin menurunkan kecurangan atau *fraud*.

b. Kelemahan

Dalam Sistem Penagihan Badan Usaha melalui edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang, yang terlihat dari laporan badan usaha yaitu data tagihan tidak sesuai dengan data badan usaha. Masalah itu terjadi jika badan usaha melakukan pengurangan karyawan dan badan usaha tidak melaporkan ke pihak BPJS Kesehatan Palembang maka tagihan yang ditagihkan ke badan usaha tidak akurat dengan yang dibayarkan oleh badan usaha. Masalah itu terjadi karena kurang nya informasi dan komunikasi dari pihak BPJS Kesehatan. Maka dari itu sering kali di temukan data tagihan iuran yang di edabu tidak sesuai dengan data badan usaha. Sehingga sistem penagihan tagihan iurannya kurang efisien.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti menyimpulkan bahwa system penagihan Badan Usaha melalui Edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang secara umum baik dan sesuai. Namun bila membandingkannya dengan standar akuntansi, sepenuhnya belum cukup efisien karena kurangnya informasi dari pihak BPJS Kesehatan untuk badan usaha yang menyebabkan tagihan tidak sesuai. Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

-
1. Prosedur Sistem Penagihan Badan Usaha di BPJS Kesehatan meliputi bukti tagihan badan usaha, tagihan iuran badan usaha dan data peserta.
 2. Dokumen yang digunakan pada system penagihan meliputi bukti tagihan badan usaha, tagihan badan usaha, tagihan iuran badan usaha dan data peserta.
 3. Fungsi yang terkait yang meliputi Admin Edabu, bagian kepesertaan, bagian keuangan dan badan usaha.
 4. Sistem Pengendalian Internal pada Edabu meliputi kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian, Pengendalian terhadap data entri dan program, pemisahan tugas dan fungsi sistem, pengendalian akses secara fisik, dan pengendalian akses secara logis

Referensi

- [1] M. B. Romney dan P. J. Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [2] Sinta, *Prosedur Penagihan Piutang atas Penjualan Spare Part pada PT. Astra Interasional Tbk Honda Cabang Denpasar*, 2013.
- [3] Andi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- [4] A. Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya, 2013.
- [5] Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.